

ABSTRAK

Abdul Pawaz: “*Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Mengikutsertakan Anak Dalam Mengonsumsi Minuman Beralkohol Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014*”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya anak dibawah umur yang diberlakukan atau diikutsertakan dalam kegiatan orang dewasa yang bersifat negatif, salah satunya yakni diikutsertakan dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Oleh sebab itu untuk melindungi anak yang dijadikan sebagai korban, pemerintah di Indonesia memberlakukan aturan terhadap orang yang mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Peraturan tersebut diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui latar belakang penetapan sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun aceh No. 6 Tahun 2014 berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis; 2) Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum tentang sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun aceh No. 6 Tahun 2014; 3) Mengetahui implikasi dan efektivitas pemberlakuan sanksi hukum bagi orang yang mengikutsertakan anak dalam mengonsumsi minuman beralkohol menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun aceh No. 6 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, metode ini memahami beberapa buku atau jurnal dengan menggunakan beberapa metode penafsiran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang sumber datanya didapat dari pustaka atau buku-buku. Lalu dianalisis dengan menggunakan *deskriptif kualitatif komparatif*.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yang pertama, dalam pembuatan ketetapan hukum tentunya ada latar belakang berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis kedua aturan ini memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, jika dalam Undang-Undang pertimbangan hukumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Tahun 1945, akan tetapi di Qanun Aceh selain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Tahun 1945 juga melihat hukum dari ketentuan Allah SWT. Kedua, dalam pembuatan ketetapan hukum ada namanya pertimbangan untuk menimbang sejauh mana peraturan dibentuk untuk kehidupan kedepannya. Antara Undang-Undang dan Qanun Aceh sama-sama untuk menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum, namun tambahan dalam Qanun aceh yakni pertimbangan tersebut sebagai dasar utama agama Islam yang membawa rahmat serta pegangan hidup. Ketiga, suatu produk hukum akan memberikan implikasi dan efektivitas. Karena sampai saat ini bertambah banyak Anak sebagai korban atas diikutsertakannya dalam mengonsumsi minuman beralkohol, maka harus diadakannya edukasi bagi orang dewasa untuk mendapatkan wawasan yang luas terhadap peraturan tersebut.